

Judul : Setya Novanto dilaporkan ke MKD
Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

Setya Novanto Dilaporkan ke MKD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketua Umum Partai Golkar ini diadukan dalam kasus dugaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). "Setya bohong," ujar Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman, di Kompleks DPR kemarin.

Menurut Bonyamin, Setya telah memberikan keterangan bohong kepada publik dengan mengaku tidak mengenal kedua terdakwa kasus e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto. Irman merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Sugiharto adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.

Bonyamin mengklaim mengantongi bukti kebohongan Setya. Ia memiliki bukti pertemuan Setya dengan Irman dan Sugiharto di dua tempat, antara lain pertemuan di Hotel Gran Melia dan di ruangan Setya di DPR. Pertemuan itu juga dihadiri pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong dan bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dian Anggraeni. "Nanti akan saya serahkan buktinya," ujarnya.

Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, kata dia, MKD akan menunggu terlebih dulu proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini Setya berstatus saksi dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. "Ketika sudah putusan, baru kami tangani," ujarnya. "Kalau misalnya terbukti di pengadilan, dengan sendirinya melanggar etika."

Setya enggan berkomentar soal pelaporan dirinya itu. "Saya belum tahu apa yang dilaporkan," ujarnya, kemarin.

Setya juga pernah dijatuhi sanksi sedang oleh MKD pada Desember 2015. Saat itu dia terbelit kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Akibat kasus ini, Setya sempat terpental dari kursi Ketua DPR dan digantikan oleh Ade Komaruddin. Belakangan, Setya berhasil kembali menduduki kursi Ketua DPR, menggantikan Ade.

● ARKHELAUS W | HUSSEIN ABRI DONGORAN